

TERCEPAT SAMPAIKAN LAPORAN, WTP KE 15, TERTINGGI TINDAK LANJUT REKOMENDASI

## LHP LKPD Kota Yogya 2023 Tembus Rekor Nasional

**YOGYA (KR)** - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogya tahun anggaran 2023 mampu menembus rekor nasional. Terutama berkaitan torehan positif atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY.

Capaian positif yang menembus rekor nasional tersebut ialah tercepat dalam menyampaikan LKPD 2023 ke BPK RI, LHP atas LKPD 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang mencapai 15 kali berturut-turut, serta respons tertinggi dalam menindaklanjuti atas setiap rekomendasi. "Kami sangat mengapresiasi kepada Pemkot Yogya dan juga Sleman karena menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang menyerahkan LKPD auditifnya tahun 2023 kepada BPK pada tanggal 12 Januari 2024. Ini menjadi momentum karena kejadian pertama di seluruh Indonesia," ungkap Anggota V BPK RI Dr Ir H Ahmadi Noor Supit MM CSFA CGRE CertDA CFA, yang secara khusus hadir untuk menyerahkan LHP LKPD Kota Yogya 2023 di BPK RI Perwakilan DIY, Jumat (8/3).

Sesuai ketentuan, LKPD harus sudah diserahkan ke BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kota Yogya berhasil menyerahkannya pada 12 Januari 2024, baru disusul Pemkab Sleman pada

hari yang sama. Penyampaian secara dini LKPD tersebut, imbuh Ahmadi, merefleksikan kesiapan dan kemampuan sistem pengelolaan keuangan negara serta kualitas sumber daya manusia.

Dirinya berharap kecapatan dalam menyerahkan laporan mampu menjadi inspirasi bagi pema di lainnya untuk mengikuti jejak yang sama. Semakin banyak pema yang mampu melakukannya maka diharapkan akan memperkuat akuntabilitas keuangan negara dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. "Semoga semua daerah di DIY juga bisa satu langkah bersama-sama menyerahkan laporan secara serentak. Sehingga Yogyakarta selalu menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia," imbuhnya.

Terkait tindak lanjut rekomendasi atas LHP LKPD, rata-rata nasional baru menyentuh 70 persen. Akan tetapi Kota Yogya mampu menembus hingga 98,48 persen. Bahkan pada periode 2020 hingga semester II 2023, dari total 1.050 rekomendasi yang diberikan, Kota Yogya ber-

hasil menindaklanjuti hingga 98,37 persen. Sedangkan Sleman baru mencapai 72,9 persen. Dengan begitu, lagi-lagi Kota Yogya menjadi yang tertinggi di Indonesia dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Begitu pula terhadap opini WTP, Kota Yogya mampu mempertahankan hingga 15 kali berturut-turut serta belum bisa dikejar oleh daerah lain.

Sementara Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengaku hal tersebut merupakan komitmen bersama antara Pemkot dan DPRD Kota Yogya yang selalu bersinergi dan menjalankan pemerintahan. Pihaknya juga berkomitmen untuk mengejar tindak lanjut rekomendasi hingga 100 persen. "Ke depan tentu kita akan mengeratkan barisan di pemerintah kota menyangkut akuntabilitas, transparansi penggunaan APBD dan dana lainnya," katanya.

Menurutnya, selama ini yang menjadi rujukan atas pengelolaan keuangan negara adalah hasil audit dari BPK. Terutama menyangkut pengelolaan keuangan yang dilakukan selama ini. Apalagi dalam melakukan audit BPK tidak lepas dari standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatutan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan.

Senada, Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudyatmoko, menilai capaian tersebut tidak muncul begi-

tu saja namun berproses selama beberapa tahun. Pihaknya pun akan menjalankan fungsi pengawas-

an jalannya pemerintah daerah secara optimal, khususnya dalam pelaksanaan keuangan negara

termasuk sejak dalam perencanaan agar benar-benar berujung pada kesejahteraan masyarakat. (Dhi)-f



YOGYA DIBAYANGI ANCAMAN KEMACETAN

## Butuh Terobosan dan Kebijakan Eksklusif

**Bambang Seno Baskoro  
Komisi C**



KR-Istimewa

**YOGYA (KR)** - Kota Yogya dinilai akan menghadapi dua ancaman yang membutuhkan terobosan serta kebijakan eksklusif. Ancaman tersebut ialah persoalan sampah seiring penutupan TPA Piyungan dan bayang-bayang kemacetan arus lalu lintas.

Anggota Komisi C DPRD Kota Yogya Bambang Seno Baskoro, menyebut untuk masalah sampah sebenarnya sudah dialami satu tahun terakhir. Pihaknya pun akan terus mendukung langkah Pemkot terkait upaya pengelolaan sampah untuk menuju desentralisasi. Di sisi lain, bayang-bayang ancaman kemacetan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. "Kota Yogya ini luasnya hanya 32,5 kilometer persegi. Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemkot mencapai 200 kilometer. Belum lagi pertumbuhan kendaraan bermotor juga sangat tinggi seiring kota tujuan pendidikan dan wisata. Potensi kemacetan bisa melebihi DKI Jakarta," ungkapnya.

Dengan luas wilayah yang terbatas maka upaya mengantisipasi kemacetan juga cukup terbatas. Berbeda dengan Jakarta yang bisa leluasa membangun fly over maupun underpass hingga jalur

khusus bagi angkutan umum. Sedangkan Kota Yogya kapasitas jalan sudah maksimal sementara beban lalu lintas terus bertambah. Oleh karena itu, pimpinan Fraksi Partai Golkar ini menilai perlu ada terobosan maupun kebijakan yang sifatnya eksklusif. Dicontohkannya pembatasan bus dimensi besar untuk masuk Kota Yogya yang layak untuk diterapkan. Langkah itu bukan untuk membatasi jumlah wisatawan melainkan hanya pembatasan ar-

mada. "Misal bus besar itu nanti diparkir di kantong-kantong luar kota, namun nanti disiapkan armada yang lebih kecil untuk mengangkut wisatawan menuju berbagai destinasi. Itu bahkan bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat," imbuhnya.

Solusi lain ialah pengadaan angkutan umum yang nyaman, aman dan tepat waktu. Saat ini Trans Jogja sudah cukup nyaman dan aman namun belum memiliki kepastian waktu. Jika angkutan umum sudah memiliki jaminan waktu untuk mencapai tujuan maka minat masyarakat dalam menggunakannya juga pasti akan meningkat. Dengan begitu penggunaan kendaraan pribadi bisa semakin kecil serta mengurangi beban jalan yang sudah sangat terbatas di Kota Yogya.

Hal yang tidak kalah penting, imbuh Bambang Seno Baskoro, ialah edukasi secara massif di masyarakat. Tempat-tempat yang menjadi area larangan parkir harus dipahami dan ditaati oleh semua pihak. Pemasangan garis biku-biku sebagai area larangan parkir merupakan salah satu bagian manajemen rekayasa lalu lintas guna meminimalisir potensi kemacetan. (Dhi)-f



KR-Ardhi Wahdan

**Pj Walikota Yogya menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2023 dari BPK RI dengan opini WTP ke-15 berturut-turut.**

### BANGUN BUDAYA INTEGRITAS DAN BEBAS KORUPSI

## L2Dikti Wilayah V Ajak Kampus Tolak Gratifikasi

**YOGYA (KR)** - Kolaborasi yang kuat dengan melibatkan semua stakeholder merupakan kunci untuk membangun budaya integritas yang kokoh disetiap Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) di Indonesia. Kolaborasi tersebut tidak hanya pertukaran ide dan praktik terbaik, tetapi juga memperluas dampak positif yang dapat diciptakan dalam memajukan integritas di lingkungan pendidikan tinggi. Semua itu dilakukan untuk membangun fondasi yang kuat dalam praktik-praktik berintegritas di lingkungan pendidikan, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi.

"Budaya integritas dan pencegahan terhadap korupsi bisa dilakukan lewat

berbagai cara termasuk dari lingkungan pendidikan. L2Dikti Wilayah V sudah mulai menerapkan hal itu sejak tahun 2021 bahkan secara tegas menolak gratifikasi parcel lebaran. Untuk itu PTS diwantiwanti agar tidak memberikan gratifikasi terkait dengan layanan yang diberikan oleh L2Dikti," kata Kepala Lembaga LLDIKTI Wilayah V Prof Setyabudi Indartono, MM PhD didampingi Sekretaris RBZI Seditjendiktiristik Mohammad Ali Akbar MBA disela-sela Program Pendampingan Visitasi Zona Integritas di Kantor L2Dikti Wilayah V, Jumat (8/3).

Setyabudi mengatakan, L2Dikti Wilayah V DIY mencoba menerapkan aturan larangan menerima

gratifikasi bagi pegawai, baik dari perguruan tinggi di DIY maupun instansi lain. Aturan yang dimulai sejak 2021 silam itu sebagai salah satu contoh melaksanakan amanat Reformasi Birokrasi dalam rangka menciptakan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Walaupun dalam realitanya penerapan larangan tersebut bukan perkara yang mudah.

"Sejak diberlakukan, masih saja ada peluang-peluang gratifikasi dari berbagai pihak. Karena itu L2Dikti membuat lesari gratifikasi untuk meletakkan berbagai parcel dan bingkisan lain yang dipaksakan dibawa ke kantor L2Dikti," terangnya.

Mohammad Ali Akbar mengungkapkan, gratifikasi harus menjadi musuh bersama. Konsekuensi dari itu jika pegawai dibawa Kemendikbud Ristek terbukti menerima gratifikasi maka akan mendapatkan sanksi. Pasalnya, sebetulnya larangan gratifikasi sudah diatur secara jelas dalam peraturan tentang disiplin pegawai. Dimana kalau ada pegawai yang melakukan gratifikasi bisa dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat. (Ria)-f



KR-Riyana Ekawati

**Prof Setyabudi Indartono PhD dan Mohammad Ali Akbar MBA saat memberikan penjelasan kepada media.**

### PUNCAK PERINGATAN HUT-12 RSA UGM

## Pencanangan Zona Integritas, Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi



KR-Devid Permana

**Pencanangan zona integritas RSA UGM.**

**SLEMAN (KR)** - Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM menggelar puncak peringatan HUT ke-12 RSA UGM di Healing Garden RSA UGM, Jumat (8/3). Selama 12 tahun, RSA UGM terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dengan meluncurkan berbagai inovasi dari segi pelayanan, pendidikan, serta pengabdian masyarakat.

Salah satu langkah penting yang diambil adalah dengan memulai Pencanangan Zona Integritas, Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi. Ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Berbagai kegiatan telah digelar memeriahkan HUT ke-12 RSA UGM dengan tema "Kolaborasi Indah, Menuju Berkah" yang mencerminkan semangat untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak demi mencapai tujuan bersama. Serangkaian kegiatan tersebut mencakup pengabdian masyarakat, kegiatan ilmiah, lomba untuk umum, serta berbagai acara hiburan dan keagamaan.

Sedangkan saat acara puncak peringatan HUT dilakukan penandatanganan pakta integritas, peresmian layanan baru RSA UGM oleh Rektor UGM Prof Ova Emilia bersama Direktur Utama RSA UGM Dr dr Darwito beserta jajaran dimeriahkan pertunjukan prajurit bregada. Hadir dalam acara Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, perwakilan Kemendikbudristek, Lembaga Om-

budsman DIY, Kejaksaan Negeri Sleman, Polda DIY, pemerintah daerah, mitra kerja, serta masyarakat umum.

Dirut RSA UGM Dr dr Darwito SH SpB(K) Onk mengatakan, banyak inovasi yang telah dilakukan oleh RSA UGM tahun ini. Beberapa layanan baru telah dicanangkan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti klinik eksekutif BPJS, ortopedic center, stroke center, pengembangan ICU, healing garden dan terbaru adalah kedokteran presisi (precision medicine). "Seperti yang dikatakan oleh Rektor UGM, RSA UGM menjadi pusat precision medicine yang didukung oleh para ilmuwan UGM," katanya.

Sedangkan terkait komitmen RSA UGM menjamin mutu dan keselamatan pasien, menurut Darwito, layanan rumah sakit sangat terkait dengan kepercayaan (trust) dari pasien. Jaminan mutu itu dibuktikan dengan akreditasi rumah sakit termasuk layanan-layanannya. "Salah satunya juga bagaimana RSA UGM sebagai wilayah/zona integritas yang bebas dari korupsi. Maka setiap layanan rumah sakit harus ada pengawasan, salah satunya diawasi oleh lembaga ombudsman," katanya.

Rektor UGM Prof Ova Emilia mengatakan, mandat rumah sakit sebagai lembaga publik adalah memberikan pelayanan, dan pelayanan tidak akan berjalan tanpa adanya kepercayaan dari pelanggan internal maupun eksternal. Kepercayaan menjadi satu modal penting, sehingga semuanya harus men-



KR-Devid Permana

**Penandatanganan prasasti komitmen menjamin mutu dan keselamatan pasien.**



KR-Devid Permana

**Peresmian layanan baru RSA UGM.**



KR-Devid Permana

**Puncak peringatan HUT ke-12 RSA UGM dimeriahkan prajurit bregada.**

jaga integritas yang menyukseskan ekosistem kesehatan secara komprehensif yang menerapkan nilai anti korupsi sebagai prinsip dasar kelembagaan.

"UGM sangat mendukung untuk memerangi korupsi, baik di dalam maupun di luar kampus, dan saya juga berharap RSA UGM sebagai salah satu entitas penting dalam ekosistem UGM memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta menjadi teladan dalam praktik-praktik yang berintegritas," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan momentum pencanangan zona integritas ini menjadi bukti dan komitmen keseriusan RSA UGM untuk membangun layanan kesehatan yang bebas dari korupsi dan mampu memberikan pelayanan yang bersih dan berorientasi melayani. "Mewujudkan zona integritas merupakan sebuah tanggung jawab bersama mulai dari pimpinan, seluruh jajaran rumah sakit dan seluruh tenaga kesehatan," katanya. (Dev)